

**IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS
NOMOR 25 TAHUN 2019 (STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA
KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA)**

Mahlita Fibry Wachidah

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
mahlitaok@gmail.com

Dr. Bambang Kusbandrijo, MS

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bk.untag@gmail.com

Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M,Si

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda.. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum milenial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedesaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial. Kegiatan yang berkenaan dengan organisasi ini. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. berkenaan dengan penulis judul yang diambil implementasi kebijakan menimbang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1terkait tugas karang taruna di kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan. Peneliti berusaha mengenali lebih lanjut terkait implementasi tugas karang taruna di kelurahan jepara. Konsep dan teori Marilee S. Grindle terkait implementasi yang digunakan oleh peneliti saat ini. Jenis metode digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil

yang dilakukan peneliti implementasi kebijakan tugas karang taruna yang dilakukan melalui delapan indikator terbukti semuanya sesuai dengan hasil tugas karang taruna. Tetapi disisi lain ada kendala yang dirasa hal itu menjadi faktor penghambat berjalannya kinerja atau tugas karang taruna

Kata kunci ; tugas, karang taruna, implementasi kebijakan

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda.. Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum millennial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedesaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial.

(Bina Karang Taruna, 2005) seperti yang disebutkan (a). Karang taruna ialah satu dari banyaknya organisasi sosial tempat dimana suatu perkumpulan itu dibentuk oleh masyarakat, fungsinya tidak jauh untuk melakukan usaha mensejahterakan nilai masyarakat. (b). Tempat berkembangnya kaum millennial, seperti yang diketahui karang taruna digunakan untuk tempat melakukan beberapa kegiatan dan aktivitas dalam meningkatkan dan berkembangnya rasa, cipta, karsa dan karya kaum millennial untuk melakukan pengembangan sumber daya pemberdayaan manusia. (c). Terdapatnya tanggung jawab sosial dalam rangka partisipasi penanganan serta terdapatnya bentuk perhatian kepada berbagai masalah dan kondisi di lingkungan merupakan fondasi dari perkembangan dan peningkatan karang taruna. (d). Melalui kaum millennial yang berada dalam masa berkembang juga selaras dengan meningkatnya karang taruna, kaum millennial juga mengelola dan mengurus segala kebutuhan juga kepentingan karang taruna serta berpartisipasi dalam aktivitas dalam kegiatan bermasyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Baik itu peningkatan dan pertumbuhan karang taruna juga mendapatkan pengaruh dari kelompok etnis setempat maupun masyarakat daerah pedesaan juga perkotaan. (e). perkembangannya dalam aspek upaya mensejahterakan nilai masyarakat dapat diartikan apabila segala bentuk aktivitas dan program yang dilaksanakan karang taruna dilakukan sebagai tujuan dalam rangka menciptakan kemakmuran masyarakat terlebih bagi kaum millennial.

Tersedianya kelompok karang taruna ini warga berharap agar tersedia perbedaan signifikan terkait kemampuan kaum millennial serta warga di lingkungan selaras salah satu tujuan dari karang taruna guna menerima masukan dan saran masyarakat terlebih bagi kaum millennial sebagai perwujudan bentuk kepedulian serta kesadaran dalam lingkungan bermasyarakat.

Masyarakat sekitar serta Pemerintah cukup menantikan sepenuhnya kepada pemuda yang mempunyai ide serta perubahan dalam berorganisasi, karena mereka akan merasakan secara langsung pengaruhnya. Namun, pemuda kini mempunyai karakter yang selalu ingin diajak, dirangkul dan selalu maju agar memperlihatkan potensi dirinya masing-masing padahal pemuda pasti memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para orang dewasa dan lanjut usia. Melalui

aturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 bagian a dan b menyebutkan tugas Karang Taruna yakni Menumbuhkan potensi masyarakat terutama kaum milenial.

Fakta yang ditemui pada Kelurahan Jepara pemuda atau anggota Karang Taruna sudah menjalankan tugasnya dalam usaha kesejahteraan social dan pemberdayaan generasi muda serta lingkungan yang komprehensif sebagai individu. Pemuda di Kelurahan Jepara turut adil merangkai kegiatan serta menggunakan waktu untuk menjalankan tugas sebagai pemuda yang bertanggungjawab terhadap social atau masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala lain seperti dukungan para petinggi kelurahan.

Menimbang Karang Taruna dengan memperhatikan dalam Pedoman Dasar yang diatur Permensos 25 tahun 2019 terkait Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial Pasal 6 Ayat (1) bagian a menjelaskan tentang pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang penulis menarik skripsi dengan judul “Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos No 25 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :1. Isi kebijakan (*content of policy*): a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. b. Derajat perubahan yang diinginkan. c. Kedudukan pembuat kebijakan. d. (Siapa) pelaksana program. e. Sumber daya yang dihasilkan 2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*): a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b) Karakteristik lembaga dan penguasa. c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Direktorat Bina Karang Taruna (2005), Karang taruna sebagai salah satu tempat perkumpulan di masyarakat yang menaungi pada kegiatan sosial. Organisasi ini memiliki fungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun (2019) Pasal 6 (1) Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan peneliti ialah deskriptif kualitatif. Peneliti akan melakukan penelitian di kelurahan jepara kecamatan bubutan Kota Surabaya. Fokus penelitian ini terhadap Implementasi Tugas Karang Taruna Di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :1. Isi kebijakan (*content of policy*): a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. b. Derajat perubahan yang diinginkan. c. Kedudukan pembuat kebijakan. d. (Siapa) pelaksana program. e. Sumber daya yang dihasilkan 2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*): a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b) Karakteristik lembaga dan penguasa. c) Kepatuhan dan daya tanggap. Berikut pembahasan mengenai teori tersebut :

Isi kebijakan (*content of policy*)

a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Terdapat segala macam manfaat maupun berbagai keuntungan dalam seluruh program yang telah di implementasikan karang taruna. dari hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti dengan informan. Beberapa program yang telah dijelaskan memiliki berbagai keuntungan dan manfaat yang berbeda, baik itu program Olah Limbah, program Hidroponik, Program UMKM, program Sadar Olshop, dan Program Lomba 17 Agustus.

Melalui hasil yang diperoleh dari temuan data, manfaat serta keuntungan yang telah diperoleh dari berbagai program yang disebutkan telah sejalan dengan teori Grindle tentang Implementasi Kebijakan. Program dalam implementasinya harus memiliki manfaat nyata dalam bentuk dampak positif yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut agar kebijakan atau program mampu menghasilkan keuntungan baik pelaksana maupun masyarakat.

b. Derajat perubahan yang diinginkan.

Dalam melakukan atau melaksanakan sebuah program, tentunya akan terdapat sesuatu yang diharapkan seperti pencapaian. Proses dalam melakukan implementasi program diharapkan untuk dapat menciptakan perubahan tentang seberapa besar itu mampu atau hendak dicapai. Proses perubahan tersebut tentunya harus dalam skala besar yang jelas. Seperti beberapa program yang telah dilakukan oleh karang taruna. beberapa program yang telah di implementasikan tidak terlepas dari adanya sebuah pencapaian dari perubahan yang terjadi selama proses implementasi.

Seperti salah satu program yang telah dijelaskan melalui temuan data yang diperoleh peneliti. Program UMKM dalam implementasinya juga telah membuktikan suatu perubahan yang diinginkan oleh pelaksana. Terbukti melalui adanya beberapa masyarakat yang mulai menerapkan usaha mandiri dari hasil implementasi program UMKM. Meski belum mencapai hasil yang diinginkan atau target pelaksana selama melaksanakan implementasi program UMKM, namun masyarakat telah memiliki bekal atau modal kedepannya untuk melakukan usaha kecil dan menengah tanpa harus mencari pekerjaan.

c. Kedudukan pembuat kebijakan.

Sebuah kebijakan atau program tentunya tidak terlepas dari beberapa pemikiran oleh individu atau kelompok. Proses dalam menciptakan atau merealisasikan program tersebut juga tidak

secara langsung dilakukan ketika sebuah program baru saja di usulkan. Hal tersebut tentunya juga harus melalui beberapa pertimbangan. Seperti program yang telah di implementasikan oleh karang taruna, sebelum program tersebut akan dilaksanakan tentunya harus melalui beberapa persetujuan dari pihak karang taruna juga perangkat. Pengambilan keputusan dari sebuah program tidak kemudian seluruhnya diserahkan kepada karang taruna, tetapi juga melibatkan beberapa individu atau kelompok lain.

Dalam suatu program sangat penting menentukan letak pengambilan keputusan karena program tersebut nantinya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan harus melalui berbagai macam pertimbangan. Sebuah program yang hanya dibuat tanpa menentukan letak pengambilan keputusan tidak akan mampu berjalan secara maksimal karena akan terdapat beberapa pihak yang tidak terlalu memperhatikan perkembangan program tersebut.

d. (Siapa) Pelaksana Program

Pelaksanaan suatu program tentunya membutuhkan seseorang atau individu yang mampu bertanggung jawab sepenuhnya. Meski begitu suatu program yang dilaksanakan bukan hanya bergantung kepada satu atau dua orang, tetapi juga melibatkan seluruh pihak yang berkaitan. Seperti halnya karang taruna yang telah melaksanakan atau menjalankan beberapa program. Meskipun mereka memiliki seseorang yang bertanggung jawab selama proses implementasi program, terdapat pihak lain yang juga terlibat dalam pelaksanaan program selain karang taruna. keterlibatan suatu pihak dalam program karang taruna juga didasari atas kompetensi terkait pemahaman akan sebuah program serta implementasinya.

Beberapa program yang diterapkan oleh karang taruna juga terbukti mampu berjalan lancar karena salah satu faktornya juga dalam setiap program yang diterapkan juga memiliki seorang individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan yang lain terkait dengan sebuah program. Kompetensi individu dapat dibuktikan selain dari tingkat pemahaman akan sebuah program juga harus mampu dibuktikan secara praktik seperti mampu memobilisasi setiap hal yang harus dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

e. Sumber Daya yang dihasilkan

Menjalankan sebuah program bukan hanya berkaitan dengan tenaga dan juga pemikiran oleh seorang individu atau kelompok. Pelaksanaan program juga tentunya harus melibatkan sejumlah sumber daya. Setelah program tersebut di implementasikan, bukan hanya mendapatkan manfaat dan keuntungan secara non-fisik tetapi juga mampu mendapatkan manfaat secara fisik seperti menghasilkan sejumlah sumber daya.

Seperti salah satu program yang telah dijelaskan melalui hasil temuan data. Program Olah Limbah yang dilaksanakan oleh karang taruna menggunakan beberapa sumber daya yang diperlukan sebagai upaya mendukung suksesnya program tersebut. Sumber daya seperti sampah rumah tangga merupakan sumber daya utama yang diperlukan oleh karang taruna dalam upaya melakukan daur ulang. Hal tersebut diperlukan agar nantinya mampu menghasilkan sumber daya

melalui daur ulang seperti karya kerajinan tangan yang dapat dijual melalui limbah plastic serta pupuk kompos yang mampu dihasilkan melalui limbah non-organik.

Lingkungan implementasi (*context of implementation*)

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Suatu program atau kebijakan tentunya melibatkan beberapa pihak. Program yang dijalankan atau dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari sebuah kepentingan kelompok atau individu. Program selama proses implementasinya juga harus memiliki actor yang terlibat sepenuhnya dalam perencanaan terutama dalam membuat strategi baik dalam persiapan maupun pelaksanaan. Seperti halnya karang taruna, program yang mereka laksanakan tidak terlepas dari beberapa hal tersebut. Karang taruna sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertentu dalam sebuah program, melibatkan beberapa pihak lain yang juga memiliki kekuasaan. Keterlibatan pihak selain karang taruna juga harus berdasarkan atas kepentingan dari individu maupun kelompok tersebut dalam suatu program. Akan tetapi tidak semua dari mereka yang mampu menjadi actor yang menjadi perencana dalam sebuah program.

Hal yang selalu diperhatikan sebelum melakukan implementasi program tentunya menyusun sebuah rencana atau strategi sebelum kemudian melakukan taktis. Strategi yang biasa dilakukan sebelum melakukan implementasi program yakni terlebih dahulu bagi pelaksana untuk melakukan konsolidasi terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut untuk menentukan jalan yang harus dilakukan agar implementasi berjalan sesuai dengan langkah yang diperlukan dan mencapai hasil yang maksimal.

b. Karakteristik Lembaga dan penguasa

Berbagai pemikiran serta perencanaan dalam implementasi suatu program harus melalui satu atau dua pertimbangan sebelum dilaksanakan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan implementasi program yakni karakteristik. Dalam sebuah lembaga tentunya memiliki sebuah tujuan yang menjadi focus selama pengoperasiannya baik itu dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya maupun lainnya. Lingkungan juga harus menjadi karakteristik yang perlu di perhatikan sebelum melaksanakan implementasi program.

Karakteristik lingkungan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap implementasi program. Sebelum sebuah program diciptakan tentunya harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi lingkungan baik itu melalui aspek ekonomi, kesehatan, juga pendidikan seperti halnya dengan karakteristik lembaga. Lingkungan masyarakat kelas menengah atas tentunya tidak akan cocok apabila diberlakukan implementasi program yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Proses implementasi program tentunya harus melibatkan sejumlah atau beberapa pelaksana. Dalam mencapai keberhasilan sebuah program tentunya harus juga menjaga sikap akan

kepatuhan pelaksana baik itu selama perencanaan sampai implementasi program. Kepatuhan pelaksana dalam implementasi program bisa terlihat dalam respon yang diberikan. Bagaimana pelaksana memberikan daya tanggap dalam penanganan selama implementasi program.

Dari kepatuhan yang diberikan pelaksana tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam implementasi program. Pelaksana yang kurang dalam memberikan sikap yang harus diberikan kepada baik itu masyarakat dan implementasi program, akan sangat berkaitan dengan respon yang diberikan pelaksana selama proses implementasi program. Meski sebagai pelaksana yang memiliki seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan, jika tingkat kepatuhan dinilai kurang selama implementasi maka respon mereka terhadap program juga tidak akan antusias atau aktif selama kegiatan dilaksanakan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat

Kebijakan maupun program yang diimplementasikan harus memiliki dampak yang mampu dihasilkan. Agar mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan lingkungan melalui implementasi program. Beberapa faktor juga mampu memberikan pengaruh terhadap sebuah kebijakan atau program. Faktor pendukung dan penghambat akan selalu ada dalam setiap implementasi program baik itu melalui sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi, maupun disposisi.

Seperti hasil temuan data yang diperoleh peneliti, program yang di implementasikan karang taruna juga pastinya memiliki beberapa faktor baik itu pendukung maupun penghambat. Implementasi program tidak selalu berjalan dengan baik meskipun memiliki beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari sumberdaya manusianya masyarakat kelurahan jepara sangat antusias dan mendukung dengan adanya karang taruna atau programnya demi kemajuan wilayah kelurahan jepara. Selalu terdapat sedikitnya satu faktor penghambat dalam setiap program yang di implementasikan seperti yang sudah dikemukakan oleh peneliti temuan data yang diperoleh dari faktor penghambat ialah kurang adanya monitoring dari pihak perangkat atau kelurahan terhadap karang taruna, terlebih untuk dukungan secara financial yang dirasa kurang diperhatikan dari adanya karang taruna. Hal tersebut nantinya mampu menjadi evaluasi bagi pelaksana sebagai upaya untuk nantinya meminimalisir faktor penghambat dalam implementasi program.

E. PENUTUP

Menurut teori indikator isi kebijakan manfaat serta keuntungan yang telah diperoleh dari berbagai program yang disebutkan telah sejalan dengan teori Grindle tentang Implementasi Kebijakan. Terbukti melalui adanya beberapa masyarakat yang mulai menerapkan usaha mandiri dari hasil implementasi program UMKM. Meski belum mencapai hasil yang diinginkan atau target pelaksana selama melaksanakan implementasi program UMKM, namun masyarakat telah memiliki bekal atau modal kedepannya untuk melakukan usaha kecil dan menengah tanpa harus mencari pekerjaan. Pengambilan keputusan dari sebuah program tidak kemudian seluruhnya diserahkan kepada karang taruna, tetapi juga melibatkan beberapa individu atau kelompok lain.

Beberapa program yang diterapkan oleh karang taruna juga terbukti mampu berjalan lancar karena salah satu faktornya juga dalam setiap program yang diterapkan juga memiliki seorang individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan yang lain terkait dengan sebuah program. Dengan adanya salah satu program Olah Limbah nantinya mampu menghasilkan sumber daya melalui daur ulang seperti karya kerajinan tangan yang dapat dijual melalui limbah plastic serta pupuk kompos yang mampu dihasilkan melalui limbah non-organik. Sedangkan menurut indikator lingkungan implementasi, program yang karang taruna laksanakan tidak terlepas dari beberapa hal tersebut. Karang taruna sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertentu dalam sebuah program, melibatkan beberapa pihak lain yang juga memiliki kekuasaan. Lingkungan masyarakat kelas menengah atas tentunya tidak akan cocok apabila diberlakukan implementasi program yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup. Karang taruna memiliki tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan, jika tingkat kepatuhan dinilai kurang selama implementasi maka respon mereka terhadap program juga tidak akan antusias atau aktif selama kegiatan dilaksanakan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh peneliti penelitian ini memiliki faktor pendukung dan penghambat yaitu dari faktor pendukung dari sumberdaya manusianya masyarakat kelurahan jepara sangat antusias dan mendukung dengan adanya karang taruna atau programnya demi kemajuan wilayah kelurahan jepara. Sedangkan, faktor penghambat ialah kurang adanya monitoring dari pihak perangkat atau kelurahan terhadap karang taruna, terlebih untuk dukungan secara financial yang dirasa kurang diperhatikan dari adanya karang taruna.

Berkaitan dengan adanya beberapa indikator pada penelitian ini peneliti memberikan saran mengenai implemementasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pihak karang taruna kelurahan jepara yang pelaksanaannya sudah sesuai namun karang taruna dapat meningkatkan dan mengembangkan kembali inovasi agar berjalannya suatu kegiatan dapat terkoordinir dengan baik antara kelurahan, karang taruna, dan warga sekitar. Diharapkan pihak kelurahan jepara dapat memberikan dukungan sepenuhnya bagi karang taruna dalam melaksanakan kegiatan baik dukungan informatif maupun dukungan berupa financial untuk diperhatikan, sehingga dapat dipertimbangkan lagi dengan adanya program untuk masyarakat. Bagi karang taruna diharapkan memperbanyak dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar semua dapat berjalan dengan konsep yang telah diterapkan oleh karang taruna sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Grindle. 1980. *Konsep Implementasi*. Jakarta : Gramedia Miles & Huberman. 2001. *Metode Penelitian*

Kualitatif. Jakarta: Gramedia

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. F., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Islamy, M. Irfan. 2003. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Malang : Universitas Negeri Malang